



## DISORGANISASI PENERAPAN PSBB DI DKI JAKARTA SEBAGAI REFLEKSI KOMPLEKSITAS RELASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN PEMERINTAH PUSAT

Faiz Rafiza Ahmadani & Rafi Aquary  
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

### ABSTRAK

Large-scale social restrictions or PSBB have brought up immense multidimensional effects within the Indonesian political landscape. One of the things which could be dissected from this regard would be in the governance system. In this sense, one might take a look at the current management of the COVID-19 pandemic within the Province of Special Capital Region of Jakarta. In this province, the Indonesian central government has often „collided“ with the province’s regional government; which ranging from issues such as social assistance, transportation, economic, and also law enforcement. The impact of such „skirmish“ has taken its toll on all of the city’s residents; but most importantly hit it the hardest for the city’s poorest and most vulnerable group. With this in mind, the goal of this paper is to broaden the knowledge within the issue of pandemic management, especially within the Indonesian context. Besides, it also strives to find out several recommendations which should be taken by the government in order to „solve“ this issue as comprehensively as possible.

**Kata Kunci:** PSBB, Public Policy, COVID-19 Pandemic, Regional Autonomy and Health Crisis.

### 1. PENDAHULUAN

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi DKI Jakarta telah berlangsung selama hampir setengah warsa ini. PSBB merupakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat bagi daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 untuk mengontrol penyebarannya. PSBB juga merupakan solusi yang diberikan pemerintah pusat bagi daerah agar tidak melakukan *lockdown* layaknya negara-negara lain yang berfungsi juga untuk meminimalisasi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Pelaksanaannya pun diserahkan kepada pemerintah daerah (pemda) menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Selama pemberlakuannya, kebijakan ini telah menarik atensi dari berbagai pihak; dan di dalamnya telah terjadi berbagai polemik kepentingan. DKI Jakarta sebagai wilayah dengan akumulasi kasus positif COVID-19 terbanyak di Indonesia (Satgas Penanganan COVID-19, 2020), menerapkan PSBB yang dalam implementasinya menimbulkan berbagai persoalan. Dalam hal ini, permasalahan klasik dan menahun, yakni pertentangan antara pusat dengan daerah menjadi semakin tampak.

\*Corresponding author.

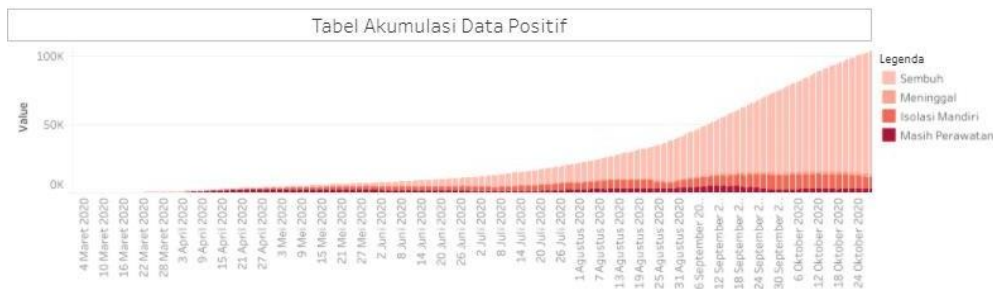
E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



DKI Jakarta yang seharusnya juga menjadi epitome dari penanganan COVID-19 bagi daerah lainnya di Indonesia, justru menjadi contoh buruk yang semakin menunjukkan adanya permasalahan serius dalam koordinasi antarpemangku kebijakan.



Tabel akumulasi data pasien positif COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta per tanggal 28 Oktober 2020 (*Jakarta Tanggapan Covid-19, 2020*)

Sejak diterapkan pada 10 April silam, PSBB di Jakarta dengan berbagai variasinya telah mendorong perbedaan politik antara keduanya yang kian lama kian meruncing. Bukannya harmoni nan baik yang ditunjukkan kepada masyarakat, melainkan semakin menunjukkan adanya ketidakselarasan koordinasi yang berjalan. Ego di masing-masing institusi pada masa krisis tampaknya semakin menjadi-jadi. Ketidaksinkronan antara keduanya diperparah dengan komunikasi publik yang selama ini tidak berjalan dengan beriringan. Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat menjadi korban atas apa yang pemerintahnya sendiri lakukan dengan kesimpangsiuran informasi yang terjadi.

## 1. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif merupakan metode yang akan dipilih dalam penulisan *paper* ini; lebih spesifiknya melalui penekanan terhadap studi kepustakaan. Menimbang hal tersebut, penulisan penelitian ini akan didasarkan pada data-data dari berbagai sumber yang dianggap oleh penulis relevan; yang meliputi buku, situs web, laporan, dan berbagai sumber sekunder lain yang dapat menunjang dalam proses pencarian data. Dalam tujuan penulisan, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu tarik-ulur kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah yang terjadi dalam perumusan kebijakan terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di luar hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat penyampaian masukan kebijakan yang lebih komprehensif dalam isu ini. Terakhir, penulis juga berharap agar *paper* ini dapat meningkatkan pengetahuan keilmuan yang terkait dengan proses legislasi dan pembuatan kebijakan; khususnya yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19 ini.

Mengenai sumber penelitian, sumber primer yang akan dijadikan „panduan utama” dalam penulisan *paper* ini akan bersumber dari laporan, buku, maupun situs web yang membahas mengenai kebijakan publik; terutama yang berkaitan dengan isu krisis kesehatan. Beberapa produk legislasi yang terkait juga akan didiskusikan sebagai sumber, misalnya undang-undang (UU), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen), atau peraturan daerah (Perda), dan gubernur (Pergub). Di luar itu, penulis juga berusaha untuk menganalisis sumber- sumber sekunder lain yang sekiranya dianggap menunjang, utamanya baik yang berasal dari situs web maupun berita-berita terkini.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Silang pendapat perumusan kebijakan PSBB dan pelengkapannya di DKI Jakarta yang diterapkan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan. Apa yang direncanakan Pemprov DKI sering kali tidak sesuai dengan apa yang direncanakan pemerintah pusat, dan begitu pula sebaliknya. Serangan demi serangan dilontarkan oleh kedua belah pihak. Padahal, seharusnya dengan tidak mengkritik secara terbuka saja sudah menunjukkan posisi masing-masing. Dalam suatu kesempatan, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, secara gamblang menyatakan bahwa pertimbangan mengenai kebijakan PSBB yang diterapkan telah didasarkan masukan-masukan dari pemerintah pusat (Lidyana, 2020). Hal tersebut tentunya mengafirmasi inkonsistensi yang selama ini terjadi oleh pemangku kebijakan itu sendiri.

Dalam aspek transportasi—khususnya yang berskala antarkota dan antarprovinsi—PSBB seharusnya dimaknai sebagai upaya mengurangi serta membatasi keluar-masuknya kendaraan dari luar DKI, dan begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, seperti yang telah diketahui, menjelang pelaksanaan Hari Raya Idulfitri tahun ini, terdapat tarik-ulur yang disebabkan miskomunikasi dan ego sepihak dari berbagai macam instansi dan lembaga yang memiliki kepentingannya masing-masing. Untuk hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020, disebutkan bahwa larangan mudik hanya berlaku bagi daerah yang memiliki zona merah, dan tidak diterapkan bagi yang berstatus zona kuning atau hijau (Permana, 2020). Secara spesifiknya, pemerintah berdalih bahwa tidak semua wilayah di Indonesia adalah zona merah dan memiliki potensi penyebaran yang signifikan. Sebagai dampaknya, pada saat puncak pelaksanaan hari raya ini, terjadi aksi „pembiaran” secara massal dan pengenduran secara masif terhadap sejumlah *checkpoint* yang biasanya menjadi titik krusial untuk mengawasi keluar-masuknya kendaraan menuju wilayah Provinsi DKI Jakarta; seperti di sejumlah gerbang tol ataupun stasiun (Kurniawan, 2020).

Salah satu penyebab lain dari munculnya konflik antara dua instansi ini, yakni dikarenakan perdebatan intens antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat mengenai pembatasan keluar-masuknya bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang terjadi pada awal April lalu. Dalam hal ini, Luhut Binsar Pandjaitan yang pada saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Perhubungan, secara „sepihak“ memutuskan untuk membatalkan Surat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 1588/-1.819.611 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pembatas bus AKAP untuk masuk ke dalam DKI Jakarta dari daerah lain (Cahyani, 2020). Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pada kala itu mengemukakan alasan kesehatan sebagai inti argumennya, sedangkan Luhut melihatnya dari kacamata ekonomi yang menurutnya dapat membawa dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku usaha transportasi. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa belum terwujudnya kesamaan visi dan misi antara dua unsur pemerintahan yang menimbulkan dampaknya bagi masyarakat luas itu sendiri.

Dari segi transportasi di dalam wilayah Provinsi DKI, masih terdapat tarik-ulur dalam proses pembuatan kebijakan yang belum terukur dan terarah dalam meminimalisasi dampak dari pandemi COVID-19 ini; misalnya yang terdapat pada layanan Trans Jakarta (TJ), Kereta Komuter (KRL), dan transportasi daring. Dalam pelaksanaan angkutan umum, masih sering kali ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang tidak hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan dari penumpang, tetapi berasal pula dari kegagapan pengelola dalam menyiapkan infrastruktur penunjang, baik angkutan umum yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun yang dikelola oleh Pemprov DKI. Miskoordinasi pun menjadi semakin jelas antara keduanya.

Selain menyangkut aspek transportasi, pertentangan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta di tengah pandemi ini juga memiliki keterkaitannya dengan persoalan penyaluran bantuan sosial; terutama di tengah situasi ekonomi seperti saat ini yang telah berdampak sangat signifikan terhadap masyarakat menengah ke bawah. Untuk isu ini, salah satu permasalahan yang

„mencuat“ terkait dengan bantuan sosial (bansos) pada April 2020 lalu, yang mana terjadi ketidaksesuaian data yang dimiliki antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, penyaluran bansos yang berada di Jakarta seolah-olah dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat; dan Pemprov DKI Jakarta ingin „lepas tangan“ dari urusan tersebut (CNN Indonesia, 2020). Di sisi lain, Anies menganggap bahwa penyaluran ini didasarkan pada asas pembagian kerja; yang mana 1,1 juta warga akan diberikan bantuan melalui Pemprov DKI Jakarta langsung, dan 3,6 juta sisanya akan melalui pemerintah pusat..

Pertentangan tidak hanya berlangsung dalam level miskonsepsi mengenai pemahaman terkait

dengan data penerimanya saja, tetapi juga sudah menyangkut aspek politis. Tentu masih segar dalam ingatan publik ketika Anies memutuskan untuk melabeli bansos yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan kalimat “dibiayai APBD DKI”; yang mana hal tersebut menimbulkan kontroversi dari pelbagai kalangan. Beberapa partai politik pada kala itu mengecam apa yang dilakukan oleh Anies ini, seperti apa yang dilakukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily, berujar bahwa apa yang dilakukan di satu sisi merupakan tindakan yang memantik perpecahan di masyarakat, dan akan menurunkan semangat gotong-royong itu sendiri (Rahayu, 2020).

Meninjau dari segi hukum, yakni Peraturan Menteri (Permen) Keuangan Nomor 43 Tahun 2020, wewenang dan tupoksi penyaluran bansos dan bantuan terkait berada di tangan pemerintah pusat. Meskipun demikian, dalam penyalurannya dapat adanya kerja sama dengan pemerintah daerah melalui pembentukan satuan kerja. Merefleksikan hal ini, seharusnya kontestasi politik antara Pemprov DKI dengan Kemenkeu ini tidak perlu terjadi, dan apa yang seharusnya dikedepankan yakni kolaborasi yang sinergis antarlembaga pemerintahan.

Dari segi ekonomi, PSBB telah membawa dampak signifikan bagi seluruh kalangan, dan salah satu yang terdampak cukup signifikan, yakni pada pengusaha; baik yang berskala UMKM maupun besar. Ketika PSBB ketat hendak diterapkan kembali setelah merespons adanya peningkatan kasus harian di DKI Jakarta, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengeluarkan pernyataan pedas yang menyemprot Anies, berkaitan dengan pengumuman yang dikatakan tendensius mengenai pemberlakuan kembali PSBB ketat di wilayah administrasinya (Lidyana, 2020). Hal tersebut menurutnya didasarkan melihat indeks Bursa Efek Indonesia yang mengalami penurunan cukup signifikan yang membuat dana asing seketika menguap. Menjadi suatu keironisan tersendiri mengingat betapa volatilnya bursa saham dari hari ke harinya yang membuatnya tidaklah tepat dalam mencerminkan kondisi perekonomian secara makro. Apalagi pernyataan tersebut keluar dari seorang pejabat pemerintah yang seharusnya mempunyai kompetensi mendalam mengenai isu tersebut.

Tentunya hal ini menjadi cerminan apa yang juga sebenarnya telah terjadi dalam tiga tahun ke belakang. Baik sindiran tajam maupun penolakan secara terbuka telah mewarnai hiruk-pikuk politik ibu kota. Ketidaksinkronan yang terjadi tampaknya sudah menjadi bagian tak-terpisahkan dalam koordinasi pengambilan kebijakan. Mulai dari revitalisasi kawasan Monumen Nasional yang didesak Kementerian Sekretariat Negara agar segera dihentikan dikarenakan penebangan pohon yang terjadi, pro-kontra pencegahan dan penanggulangan banjir di Jakarta dalam berbagai kesempatan dan berbagai aspek, hingga rencana pembangunan LRT Jakarta yang dianggap tidak

sesuai dengan *masterplan* pemerintah pusat merupakan sebagian dari sederet pertentangan lainnya (Budiman, 2020). Menjadi sangat sulit bagi keduanya untuk menyelaraskan perbedaan yang ada dengan kantor kedua kepala pemerintahan yang sebenarnya berseberangan hanya terpisahkan sebuah Lapangan Medan Merdeka.

Pandemi COVID-19 bukannya menjadi tamparan bagi keduanya dalam menjalankan *good governance* secara utuh, melainkan justru semakin menumbuhkembangkan ego antarpemangku kebijakan. Efisiensi birokrasi yang selama ini terus digaungkan oleh Presiden Jokowi sendiri dapat dilihat hanya sebagai ucapan belaka tanpa implementasi di lapangan yang konkret. Arahan Presiden yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat tidaklah diindahkan oleh jajarannya sendiri. Pada akhirnya, masyarakatlah sendiri yang menerima dampaknya dengan semakin runyamnya kondisi yang ada (Monggilo, 2020). Berkaca dari Amerika Serikat yang mana antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian saling berebutan suplai peralatan kesehatan di tengah kelangkaan yang melanda yang berakibat pada ketidakmampuan rumah sakit untuk menangani membludaknya pasien (Mencarini, 2020). Padahal, beberapa negara, seperti Korea Selatan, Cina, dan Selandia Baru membuktikan bahwa koordinasi pusat dan daerah yang baik merupakan salah satu resep dari keberhasilan mereka mengontrol penyebaran COVID-19

### 3. PENUTUP

Pertentangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seakan tiada habisnya. Peliknya relasi antara keduanya hanya menjadi semakin runyam di tengah krisis multidimensi yang masih terus berlangsung. Banyak nyawa masyarakat yang tidak bersalah menjadi tanggungan dari apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini terhitung dari awal Maret 2020. Ketidakdewasaan pemerintah dalam menerima perbedaan politik mendorong munculnya *trickle-down* kegaduhan yang timbul di masyarakat. Pilgub 2017 dan Pilpres 2019 yang sudah lama berlalu seolah-olah masih dijadikan alasan untuk berkilah dan tameng dari „dosa-dosa“ pemerintah dalam menangani pandemi ini.

Di luar arena politik, hal tersebut berpengaruh terhadap kegiatan yang sifatnya teknis, seperti pelaksanaan 3T (tracing, testing, treatment), perumusan kebijakan, penetapan PSBB, dan lainnya. Sebagai dampaknya, kini Indonesia „memimpin“ total pasien positif COVID-19 di Asia Tenggara dan disusul dengan salah satu

tingkat *fatality rate* tertinggi di dunia; yang tentu saja menjadi alarm peringatan bagi pemerintah; dan dijadikan bahan evaluasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif di kemudian hari. Pengalaman dalam menangani berbagai krisis kesehatan di masa lampau—walaupun belum pernah dalam skala pandemi ini—tampaknya hanya menjadi tinta hitam di buku saja. Masa *injury time* ini sudah seharusnya menjadi momen penebusan dosa pemangku kebijakan setelah disorganisasi yang terjadi dalam kurun waktu tujuh bulan ke belakang.

### Daftar Pustaka

- Budiman, A. (2020, February 5). *Ragam Polemik Anies Baswedan Vs Pemerintah Pusat*. Tempo. <https://metro.tempo.co/read/1303600/ragam-polemik-anies-baswedan-vs-pemerintah-pusat>
- Cahyani, D. R. (2020, March 31). *Anies Emoh Komentari Keputusan Luhut Batalkan Setop Bus AKAP*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1325897/anies-emoh-komentari-keputusan-luhut-batalkan-setop-bus-akap>
- CNN Indonesia. (2020, Mei). *SMI Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos 1,1 Juta Warga DKI*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200506160149-532-500771/smi-ungkap-anies-angkat-tangan-soal-bansos-11-juta-warga-dki>
- COVID-19 Rail Protocol: Recommendation for safe resumption of railway services in Europe*. (2020). European Union Agency for Railways. [https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Covid-19-Rail-Protocol\\_v1.4.pdf](https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Covid-19-Rail-Protocol_v1.4.pdf)
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017  
*Jakarta Tanggap Covid-19*. (2020, Oktober). Jakarta Tanggap Covid-19. <https://corona.jakarta.go.id/id>
- Kurniawan, R. (2020, Mei). *Larangan Mudik, Tol Tetap Dibuka untuk Kepentingan Khusus dan Logistik*. KOMPAS.com. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/05/08/034200615/larangan-mudik-tol-tetap-dibuka-untuk-kepentingan-khusus-dan-logistik>
- Lidyana, V. (2020, Oktober). *Terungkap! Sederet Informan di Balik Keputusan Anies soal PSBB*. detikfinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5226426/terungkap-sederet-informan-di-balik-keputusan-anies-soal-psbb>
- Lidyana, V. (2020, September 10). *Menteri-menteri Jokowi Komentari Kebijakan Anies soal PSBB Jakarta*. detikfinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5167579/menteri-menteri-jokowi-komentari-kebijakan-anies-soal-psbb-jakarta>
- Mencarini, M. W. and M. (2020, March 27). *It's state vs. State in a frantic search for medical*

*gear to battle coronavirus's spread*. The Courier-Journal. <https://www.courier-journal.com/story/news/2020/03/27/coronavirus-states-battle-each-other-world-ppe-medical-gear/2907297001/>

Monggilo, Z. M. Z. (2020). Komunikasi Publik Pemerintah Masa COVID-19: Telaah Kritis Sistem Informasi Publik. In *Tata kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (1st ed.). Gadjah Mada University Press.

Permana, R. H. (2020, April 24). *Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB, Ini Daftarnya*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4989468/larangan-mudik-2020-berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya>

Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19

Puspito, D. (2020, April 14). *KRL Commuter Line Jaga Jarak, Penumpang Gagal Jaga Jarak*. investor.id. <https://investor.id/from-the-readers/krl-commuter-line-jaga-jarak-penumpang-gagal-jaga-jarak>

Rahayu, L. S. (2020, Mei). *Anies Posting Sembako "Dibiayai APBD DKI", Golkar: Semua Tahu Dananya dari Mana*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5021815/anies-posting-sembako-dibiayai-apdb-dki-golkar-semua-tahu-dananya-dari-mana>

Ravel, S. (2020, September 11). *Ada Klaster Covid-19 di Transportasi Umum, Ini Kata Organda DKI*. KOMPAS.com. <https://otomotif.kompas.com/read/2020/09/11/080200515/ada-klaster-covid-19-di-transportasi-umum-ini-kata-organda-dki>

Satgas Penanganan COVID-19. (2020, Oktober). *Peta Sebaran*. Covid19.Go.Id. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Surat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor 1588/-1.819.611 Tahun 2020